

**KEBIJAKAN KOMITE SEKOLAH KERAH PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN BERBASIS KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN CIAMIS**

**OLEH:
ASEP SURYANA, M.Pd.
2010**

A. Latar Belakang

- Manajemen Berbasis Sekolah menghendaki keterlibatan masyarakat dalam sekolah
- Muncul peraturan baru tentang komite sekolah pengganti pertauran tentang BP3
- Muncul peraturan baru yang membatasi keterlibatan masyarakat dalam bentuk financial

B. Kerangka Pikir



Gambar Kerangka Pikir Penelitian

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui kegiatan studi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kebijakan tentang BP3 dan Komite Sekolah dilihat dari kekuatan dan kekuasaan hukumnya?

2. Bagaimana Implementasi Kebijakan BP3 dan Komite Sekolah?
3. Dampak yang dirasakan dari digulirkannya kedua kebijakan tersebut yang dirasakan oleh sekolah?
4. Bagaimana perbandingan kedua kebijakan bila dilihat dari sisi kekuatan dan kelemannya?
5. Bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jenis dan jenjang pendidikan yang berbasis kemasyarakatan?

D. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara jelas bagaimana proses dan prosedur kebijakan tentang BP3 dan Komite Sekolah dilihat dari kekuatan dan kekuasaan hukumnya?
2. Mengetahui implementasi dari kedua kebijakan tersebut?
3. Memperoleh informasi tentang dampak yang dirasakan oleh sekolah dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
4. Memperoleh informasi tentang kekurangan dan kelebihan dari kedua kebijakan tersebut?
5. Memperoleh informasi tentang jenis dan jenjang pendidikan berbasis kemasyarakatan?

E. Metode

Pendekatan Kualitatif dengan observasi pada produk-produk hukum komite sekolah dan BP3 dan komite sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis.

F. Temuan dan Bahasan

Tabel
Dasar Hukum BP 3 dan Komite Sekolah

Dasar Hukum	
BP 3	Komite Sekolah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Sekolah 3. SK Mendikbud No. 0293/U/1993 tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Sekolah (PP Komite Sekolah Belum) 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 599/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 420/Kep.2556-Disdik/2001 Tanggal 15 Juli 2001 tentang

	Penerapan MBS di Jawa Barat.
--	------------------------------

Perbandingan Pada Level Implementasi Di Lapangan

Tabel
Kekuatan dan Kelemahan Komite Sekolah

No	Sumber Data	Data		Generalisasi Data	
		Kekuatan Komite Sekolah	Kelemahan Komite Sekolah	Kekuatan Komite Sekolah	Kelemahan Komite Sekolah
1.	Kepala Sekolah	Lebih cepat berkomunikasi dan mempermudah proses untuk kemajuan siswa dengan Masyarakat /Komite Sekolah	Sulit meminta dana dari masyarakat karena dianggap cukup dari pemerintah	Menurut Kepala Sekolah: Komite sekolah mempercepat dan mempermudah proses komunikasi antara sekolah dengan komite sekolah/masyarakat. Dengan adanya proses tersebut, kegiatan sekolah lebih terfokus sehingga terjadi koordinasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan	Menurut Kepala sekolah: Kebutuhan sekolah terhadap dana/pembiayaan semakin tergantung pada pemerintah karena kondisi komite sekolah yang tidak mendukung secara material dan adanya informasi sumbangan sekolah dari masyarakat.
		Lebih terfokus dalam melaksanakan kegiatan karena ada dialog	Komite sekolah tidak selalu berada di sekolah.		
		Adanya koordinasi antara warga sekolah dengan warga masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.	Sekolah tergantung pada peran komite sekolah di masyarakat		
2.	Guru	Komite sekolah merupakan mitra sekolah demi kelancaran proses belajar mengajar.	Komite kurang mamahami fungsi dan tujuan organisasinya.	Menurut para guru, komite sekolah merupakan mitra: Dalam memperlancar PBM dan menunjang kemajuan sekolah; Saling menukar informasi dan aspirasi; Membantu menentukan arah tujuan pendidikan di sekolah.	Menurut Guru: Komite sekolah kurang memahai tugas dan fungsinya; Kurang sosialisasi; SDM Komite sekolah yang masih rendah/ kurang; Tidak ada pengawasan terhadap komite sekolah.
		Dengan adanya komite sekolah, masyarakat lebih dekat dan akrab serta dapat memperoleh informasi lebih cepat.	Tidak ada pengawasan		
		Dengan adanya komite sekolah terasa adanya kerjasama yang baik untuk menunjang kemajuan sekolah	Kurangnya sosialisasi sehingga kurang terjalin kemitraan dengan baik.		
		Merasa tertolong dalam proses koordinasi sekolah dengan masyarakat untuk menentukan arah pendidikan sekolah.	Sumber daya manusia dalam masyarakat, mayoritas lulusan SD dan SLTP		
		Bisa lebih cepat berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kemajuan siswa.	Susah atau sulit meminta dana dari masyarakat.		
		Komite sekolah dapat menampung aspirasi masyarakat secara leluasa.	Masyarakat sepenuhnya membebankan pada sekolah.		
		Guru dapat lebih fokus pada apa yang harus dikerjakan di sekolah.	Peran serta masyarakat secara umum berkurang karena telah diwakili oleh komite sekolah		
		Menunjang aspirasi masyarakat lebih leluasa.	Masyarakat mengandalkan biaya-biaya pada sekolah karena ada dana dari pemerintah.		
		Aspirasi masyarakat dapat ditampung melalui komite sekolah.	Masyarakat mengandalkan kebutuhan-kebutuhannya ke pihak sekolah.		

No	Sumber Data	Data		Generalisasi Data	
		Kekuatan Komite Sekolah	Kelemahan Komite Sekolah	Kekuatan Komite Sekolah	Kelemahan Komite Sekolah
		Dirasakan sangat baik atau mendukung sekolah.	Masyarakat selalu mengandalkan kebutuhan sekolah itu dari sumbangan pemerintah.		
	KKG	Mudah berkomunikasi dengan Masyarakat / Komite Sekolah	Tugas dan wewenang Perlu dipahami oleh Komite Sekolah	Menurut KKG: Sarana komunikasi sekolah dengan masyarakat.	Menurut KKG: Tugas dan wewenangnya belum dipahami oleh Komite Sekolah

Tabel
Perbedaan Mencolok Keterlibatan Masyarakat dalam BP3 dan Komite Sekolah

No	Sumber Data	Data		Generalisasi Data	
		Komite Sekolah	BP3	Komite Sekolah	BP3
1.	Kepala Sekolah	Komite Sekolah tergantung pada peran Ketua di masyarakat	Tidak ada perbedaan secara mencolok.	Menurut kepala sekolah: Peran komite sekolah tergantung pada peran ketua komite di masyarakat dan lebih luas pada setiap kegiatan sekolah.	Menurut kepala sekolah: peran BP3 terbatas pada mengurus dana operasional sekolah.
		Lebih luas lagi di setiap kegiatan	Terbatas hanya mengurus dana operasional sekolah		
		Siswa dapat mengikuti segala kegiatan atau ada peningkatan kegiatan yang diikuti siswa.	Keterbatasan dana sehingga peserta didik tidak dapat meningkatkan prestasinya.		
2.	Guru	Mengetahui masalah keuangan yang terjadi di sekolah.	Bantuan dibayar oleh orang tua siswa.	Menurut Guru, peran komite sekolah adalah: Mengidentifikasi masalah sekolah termasuk keuangan sekolah; Mengupayakan BOS sebagai pengganti sumber dana masyarakat; Menentukan arah pendidikan yang harus dicapai sekolah.	Menurut Guru, Peran BP3 adalah: Sumber bantuan langsung masyarakat terhadap keuangan sekolah; Tidak banyak terlibat dalam menentukan tujuan dan arah pendidikan sekolah.
		Semua kebutuhan sekolah dibayar BOS	Masyarakat membayar semua kebutuhan sekolah.		
		Semua kebutuhan sekolah dibayar BOS	Masyarakat membayar semua kebutuhan sekolah.		
		Hampir sebagian besar orang tua siswa tidak tahu menahu tentang segala sesuatu yang dibutuhkan sekolah.	Dapat terlibat secara langsung dan menyeluruh.		
		Semua kebutuhan ditanggung oleh BOS.	Masyarakat langsung membayar/mengeluarkan uang.		
		Prestasi siswa meningkat.	Ada keterlambatan dana, siswa tidak dapat meningkatkan prestasi		
		Dilibatkan untuk menentukan alur atau arah pendidikan yang harus dicapai sekolah.	Tidak banyak terlibat dengan tujuan dan arah pendidikan.		
		Menjalankan dan mereralisasikan karena ada BOS	Memajukan sekolah disertai dengan memikirkan biaya.		
		Biaya pendidikan anak ditanggung oleh Pemerintah,	Biaya pendidikan ditanggung oleh orang tua siswa.		
		Karena ada BOS, sehingga PBM lancar.	Biaya operasional sekolah agak tersendat.		

No	Sumber Data	Data		Generalisasi Data	
		Komite Sekolah	BP3	Komite Sekolah	BP3
	KKG	Luas dan mempunyai tugas khusus dalam mendukung lancarnya kegiatan sekolah.	Tidak luas jangkauannya.	Menurut KKG: Komite sekolah mempunyai peran lebih luas dan tugas khusus dalam mendukung kelancaran kegiatan sekolah.	Menurut KKG: BP3 tidak luas jangkauannya.

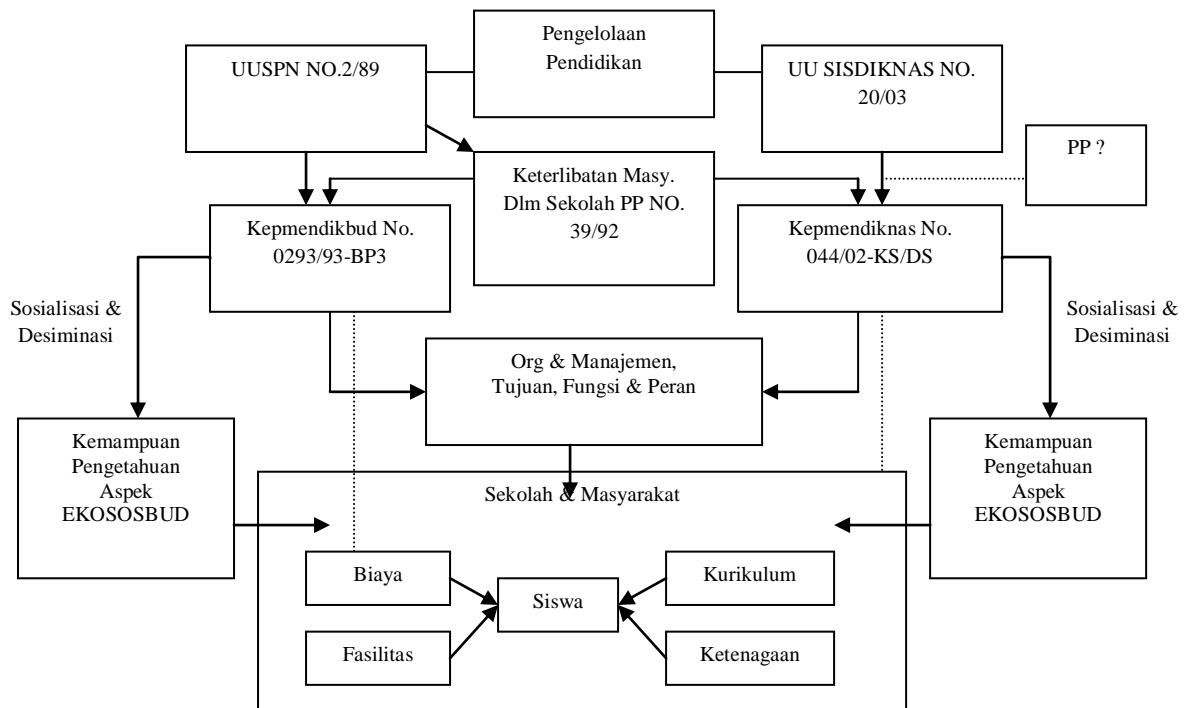
Tabel
Permasalahan yang Dihadapi Komite Sekolah
dalam Menjalankan Kemitraan

No	Sumber Data	Permasalahan yang Dihadapi Komite Sekolah	
		Data	Generalisasi Data
1.	Kepala Sekolah	Permasalahan: Masalah dana; Sering berganti kurikulum; Kekurangan tenaga pengajar; Bangunan sekolah.	Menurut kepala sekolah permasalahan yang dihadapi diantaranya: Honor Komite Sekolah; Masalah dana; Sering berganti kurikulum; Kekurangan tenaga pengajar; Bangunan sekolah.
		Permasalahan: Honor komite sekolah; Untuk berdialog secara cepat; Pandangan kemajuan sekolah jangka pendek.	
		Permasalahan: Belum ada permasalahan karena sekolah sinkron dengan Komite sekolah.	
2.	Guru	Permasalahan: Susah untuk meminta kekurangan keuangan karena mengandalkan sumbangan pemerintah.	Menurut guru permasalahan yang dihadapi diantaranya: Susah untuk meminta kekurangan keuangan karena mengandalkan sumbangan pemerintah; Rumit dalam pengerjaan administrasinya karena sering berganti-ganti; SDM di komite sekolah masih rendah; Kurang adanya kerjasama karena masalah sosialisasi komite sekolah.
		Permasalahan: Pengerjaan administrasi sangat sulit.	
		Permasalahan: Agak rumit dalam pengerjaan administrasinya.	
		Permasalahan: Untuk sekolah yang ada di daerah, apalagi di lingkungan SDM-nya yang masih kurang, keterlibatan komite sekolah masih belum dirasakan.	
		Permasalahan: Administrasi yang berganti-ganti sehingga mempersulit pihak sekolah; Komite sekolah hanya menanda tangi saja.	
		Permasalahan: Belum ada permasalahan serius karena sekolah sinkron dengan komite sekolah.	
		Permasalahan: Untuk mencapai tujuan yang ditentukan sekolah dan komite sekolah masih terbentur kepada situasi dan kondisi sekolah, seperti masalah: dana, sarana dan prasarana.	
		Permasalahan: Kurang adanya kerjasama karena masalah sosialisasi komite sekolah.	
		Permasalahan: Melanjutkan dan putus sekolah.	
3.	KKG	Permasalahan: Masalah dana; Sering berganti kurikulum; Kekurangan tenaga pengajar dan sarana.	Menurut guru permasalahan yang dihadapi diantaranya: Tidak ada komunikasi; Tidak tahu tugas komite sekolah
		Permasalahan: Tidak ada komunikasi; Tidak tahu tugas komite sekolah	

Tabel
Solusi Pemecahan masalah Implementasi Komite Sekolah

No	Sumber Data	Solusi Pemecahan Masalah dalam Implementasi Komite Sekolah	
		Data	Generalisasi Data
1.	Kepala Sekolah	<p>Musyawarah pihak sekolah dengan komite sekolah.</p> <p>Musyawarah warga sekolah dan tokoh masyarakat dengan komite sekolah untuk setiap permasalahan.</p> <p>Solusinya: Mengadakan rapat inti antara pengawas harian dengan sekolah; Rapat sekolah dengan Tim Pengurus Komite Sekolah; Rapat sekolah, komite sekolah dengan masyarakat.</p>	<p>Solusi pemecahan masalah menurut kepala sekolah:</p> <p>Rapat atau musyawarah warga sekolah dan tokoh masyarakat dengan komite sekolah untuk setiap permasalahan.</p>
2.	Guru	<p>Mengadakan musyawarah antara pengurus komite sekolah dengan sekolah masing-masing.</p> <p>Dirembukkan dan dikerjakan bersama-sama.</p> <p>Dikerjakan secara bersama-sama.</p> <p>Selama ini yang melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan sekolah adalah pihak sekolah yang dominan. Komite baru sebatas ikut menyetujui.</p> <p>Sering melakukan musyawarah.</p> <p>Dilakukan musyawarah antara pengurus komite dengan sekolah.</p> <p>Pemecahan masalah dilakukan secara bersama-sama antara sekolah dengan komite sekolah dengan mengacu kepada potensi yang ada dan kekuatan yang dimiliki.</p> <p>Rapat atau pertemuan secara terjadwal antara sekolah, komite sekolah dan masyarakat.</p> <p>Mengadakan rapat antara sekolah dan komite sekolah untuk mengambil persetujuan masyarakat dan hasil musyawarah.</p> <p>Mengadakan musyawarah antara warga sekolah dengan komite sekolah.</p>	<p>Solusi pemecahan masalah menurut guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah warga sekolah dan tokoh masyarakat dengan komite sekolah untuk setiap permasalahan; - Solusi mengacu kepada potensi yang ada dan kekuatan yang dimiliki.
3.	KKG	<p>Dipercahkan bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah</p>	<p>Solusi pemecahan masalah menurut KKG: Dipercahkan bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah.</p>

G. Kesimpulan



H. Rekomendasi

Keberhasilan pembentukan Komite Sekolah di Sekolah tidak terjadi hanya dengan asal membentuk dan ada lembaga tersebut di sekolah, akan tetapi untuk sampai kepada keberhasilan organisasi ini memberikan dukungan dan menjalankan fungsi dan peranannya seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku ada sejumlah langkah yang dapat dijadikan patokan sehingga dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Langkah tersebut dimulai dengan: 1) Analisi potensi wilayah di lingkungan sekolah, 2) Analisis posisi sekolah dalam isu-isu strategis yang berkembang, 3) Sosialisasi menyeluruh tentang adanya kebijakan Komite Sekolah di sekolah kepada semua pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah, 4) Mengoperasionalkan rencana pembentukan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah, 5) Mengembangkan dan menyusun panduan keterlibatan masyarakat melalui organisasi Komite Sekolah, 6) Pembentukan dan Penyusunan Program Kerja, 7) Pengembangan model-model kerjasama kewilayahan berdasarkan potensi wilayah setempat, 8) Menyiapkan alat evaluasi terhadap kinerja lembaga, 9) Melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam organisasi komite sekolah sesuai dengan proporsi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan bila memungkinkan untuk menambahkan disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan masyarakat.

I. Referensi

Biro Perencanaan Depdiknas, (1999), *Laporan Hasil Studi Banding Tentang Manajemen dan Perencanaan Pendidikan di Australia dan Kemungkinan implementasinya di Indonesia ; Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua Murid*, Jakarta : Depdiknas.

- Dunn N. William, (2004), *Public Policy Analysis; An Introduction*, Prentice-Hall, New Jersey.
- TIM FIP UPI, (2000), *Materi Pelatihan Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat*, Bandung : Tim FIP UPI.
- Iatridis Demetrius, (1994), *Social Policy; Institutional Context of Social Development and Human Service*, Pacific Grove, California.
- Jalal F., Supriadi D., (2001), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*
- Leslie A. Pal., (1992), *Public Policy Analysis; An Introduction*, Department of Political Science University of Calgary, Canada.
- MCNay Ian., Ozga Yenny, (1985), *Policy Making In Educational; The Breakdown of Consensus*, Pergamon Press, USA.
- Patton Carl V., Sawicki David S., (1986), *Basic Methods of Policy Analysis & Planning*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Tim Pokja MBS, (2003), *Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat*, Bandung : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
-

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, *Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Sekolah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- PP No. 28 Tahun 1989, *Tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar*.
- PP No. 29 Tahun 1989, *Tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah*.
- PP No. 56 Tahun 1989, *Tentang Tambahan Pengelolaan Pendidikan Dasar*.
- PP No. 57 Tahun 1989, *Tentang Tambahan Pengelolaan Pendidikan Dasar*.
- SK Mendikbud No. 0293/U/1993, *Tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)*
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, *Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 599/C/Kep/PG/2002, *Tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 420/Kep.2556-Disdik/2001 Tanggal 15 Juli 2001, *Tentang Penerapan MBS di Jawa Barat*.